

## **ABSTRAK**

### **PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL (studi Kasus Lapas Perempuan Kelas IIA Way Hui)**

**Oleh**

**NADYA ANGGRAINI**

Salah satu hak dasar yang diakui secara nyata untuk semua orang adalah hak atas kesehatan. Hak ini mencakup akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas bahkan apabila orang tersebut dalam masa menjadi narapidana, terlebih lagi apabila narapidana tersebut sedang menjalani kehamilan. Narapidana perempuan yang sedang hamil merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapas kelas IIA way hui terdapat 213 narapidana tercatat dari januari-desember 2024, dan 4 orang ibu hamil dan 2 anak bawaan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil serta Faktor penghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil.

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara normatif empiris, data penelitian diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dokter umum dan Bidan LAPAS Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, Lembaga Perkumpulan DAMAR Prov. Lampung dan Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana.Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil di Lapas Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Lapas telah berupaya optimal dengan menyediakan poliklinik, bekerja sama dengan rumah sakit di Bandar Lampung yang terafiliasi BPJS, serta menyiapkan tenaga medis terdiri dari 2 dokter umum, 1 bidan, dan 3 perawat selama 24 jam. Selain itu, Lapas juga memberikan perlakuan khusus berupa makanan tambahan dan kamar terpisah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak

kesehatan narapidana hamil. Faktor penghambat dari pelayanan kesehatan di lapas meliputi seperti keterbatasan alat dan tenaga medis seperti kurangnya alat medis dan tenaga medis, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pengaturan khusus dalam peraturan perUndang-Undangan terkait standar pelayanan kesehatan bagi narapidana hamil. Selain itu, kepemilikan kartu BPJS oleh narapidana sering kali menjadi kendala tersendiri. Banyak narapidana yang sebelumnya tidak memiliki BPJS saat masuk ke dalam lapas, sehingga harus melalui proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menjadi semakin rumit apabila narapidana berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, meskipun sudah ada upaya positif, pemenuhan hak ini masih memerlukan peningkatan dari berbagai aspek.

Saran dari penelitian ini adalah pihak pemerintah agar lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi narapidana seperti dengan adanya Undang-Undang khusus membahas pelayanan kesehatan narapidana yang sedang hamil, serta lapas perempuan kelas IIA way hui bandar lampung perlu meningkatkan upaya dalam memastikan seluruh narapidana memiliki kepesertaan BPJS kesehatan.

**Kata Kunci: Pemenuhan Hak Kesehatan, Narapidana, Ibu Hamil**